



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**EVALUASI PELAKSANAAN TATA KELOLA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU OLEH BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

FARHAN RAMADHAN
2063201145

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JANUARI 2025**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**EVALUASI PELAKSANAAN TATA KELOLA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU OLEH BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian
Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi Publik
Universitas Lancang Kuning

FARHAN RAMADHAN
2063201145

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JANUARI 2025**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : FARHAN RAMADHAN

Nim : 2063201145

Tanda Tangan :

Tanggal : 26 Februari 2025



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Pekanbaru

Telp. (0761) 526558 Kode Pos 28265

Web Site: <https://fia.unilak.ac.id/> email: fia@unilak.ac.id

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Farhan Ramadhan
NIM : 2063201145
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Penilaian Barang Milik Daerah
Pada Pemerintah Provinsi Riau Oleh Badan Pengelola Barang Milik
Daerah Provinsi Riau.

Pembimbing I

Dr. Trio Saputra, S.Psi., M.Si
NIDN: 1007109001

Pembimbing II

Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., M.PA
NIDN: 1009088501



Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN: 1012088804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Pekanbaru

Telp. (0761) 526558 Kode Pos 28265

Web Site: <https://fia.unilak.ac.id/> email: fia@unilak.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh:

Nama : Farhan Ramadhan

NIM : 2063201145

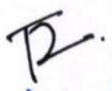
Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Evaluasi Pelaksanaan Tatakelola Penilaian Barang Milik Daerah
Pemerintah Provinsi Riau Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Riau

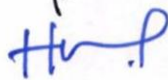
Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

DEWAN PENGUJI

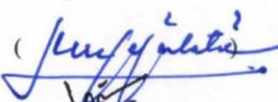
Pembimbing : Dr. Trio Saputra, S.Psi., M.Si

()

Pembimbing : Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA

()

Penguji : Dr. Surya Dailiati, S.Sos., M.Si

()

Penguji : Wasiah Sufi, S.Sos., M.Si

()

Ditetapkan di :

Tanggal :

ABSTRAK

Nama : Farhan Ramadhan

Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Penilaian Barang Milik Daerah
Pemerintah Provinsi Riau Oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Riau.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Adapun tujuan penelitian penelitian ini adalah Untuk menganalisis evaluasi pelaksanaan tata kelola penilaian barang milik daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau Pada BPKAD Riau serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam evaluasi pelaksanaan tata kelola penilaian barang milik daerah Provinsi Riau. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa evaluasi penilaian Barang Milik Daerah Provinsi Riau oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaanya secara keseluruhan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan yang mengatur, baik berupa inventarisasi, pengamanan dan pemeliharaan serta kepemilikan atas tanah karena aspek legal dari barang daerah berupa surat kepemilikan baik terhadap tanah maupun bangunan masih banyak yang belum terpenuhi seperti sertifikat tanah, surat perjanjian, dan berita acara serah terima barang Kendala yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam evaluasi penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau meliputi: Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Data Pendukung Aset Tetap, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kata Kunci : Evaluasi tata kelola, barang milik daerah, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Riau

ABSTRAK

Nama : Farhan Ramadhan

Program Studi : *Public Administration Science*

Judul : *Evaluation of the Implementation of Governance for the Assessment of Regional Assets of the Riau Provincial Government by the Riau Provincial Financial and Asset Management Agency*

This research was conducted at the Riau Province Regional Financial and Asset Management Agency. The aim of this research is to analyze the evaluation of the implementation of regional property assessment governance at the Riau Provincial Government at the Riau BPKAD and to find out what obstacles are faced by the Agency for evaluating the implementation of Regional Financial and Asset Management in the governance of regional property assessment in Riau Province. Based on the research carried out, the results can be obtained that the evaluation of the assessment of Regional Property of Riau Province by the Regional Financial and Asset Management Agency has been carried out well, but in its overall implementation it has not fully complied with the provisions in the governing regulations, both in the form of inventory, security and maintenance as well as ownership of land because the legal aspects of regional goods in the form of ownership letters for both land and buildings are still many that have not been fulfilled, such as land certificates, letters of agreement, and minutes of handover of goods. Obstacles faced by the Regional Financial and Asset Management Agency in evaluating assessments Goods Regional Property within the Riau Provincial Government includes: Human Resources, Limited Data Supporting Fixed Assets, and Regional Financial Capability

Keywords : Evaluation of governance, regional property, Regional Finance and Asset Management Agency, Riau Province

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat topik yang sesuai dengan latar belakang studi penulis di Jurusan Administrasi Publik, sehingga penulis tertarik dengan judul “Evaluasi pelaksanaan tata kelola penilaian barang Milik daerah pada pemerintah provinsi riau Pada dinas bpkad riau” tepat pada waktu. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi., S.S.,M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Ibu Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
3. Ibu Harsini, S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Dr. Li. Dra. Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
6. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

7. Bapak Dr. Trio Saputra, S.Psi., M.Si sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian serta arahan yang sangat baik untuk saya selama proses bimbingan berlangsung.
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
9. Seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang telah memberikan waktu serta data-data yang berguna bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat mendukung hingga penyelesaian penelitian ini.
10. Terkhusus kepada kedua Orang Tua dan seluruh Keluarga saya tercinta yang selalu memberi dukungan baik material maupun moril serta doa-doa yang tidak putus-putusnya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi tepat waktu
11. Kepada pacar saya Gilda Khansa terimakasih telah mendoakan dan memberi semangat selama proses skripsi ini. Kehadiranmu membuat perjalanan ini lebih ringan dan lebih bermakna.

Akhir kata, Peneliti menyadari bahwa penulisan penelitian masih jauh dari sempurna maka saran dari semua pihak dibutuhkan demi penyempurnaan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi peneliti dan para pembaca.

Pekanbaru, Januari 2025

Penulis

(Farhan Ramadhan)

NIM: 2063201145

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Kajian Teoritis	11
2.1.1 <i>Good Governance</i>	11
2.1.2 Prinsip <i>Good Governance</i>	15
2.1.3 Manajemen Aset	16
2.1.4 Pengelolaan Aset Daerah	19
2.1.5 Evaluasi	21
2.1.6 Konsep Penilaian Barang Milik Daerah	25
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Design Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian	34
3.3 Informan Penelitian	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisa Data	37
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Provinsi Riau.....	39
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau	39
4.1.2 Visi dan Misi Provinsi Riau	42
4.1.3 Pemerintahan	45
4.2 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	49
4.2.1 Gambaran Umum	49
4.2.2 Visi dan Misi	50
4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	52
4.2.4 Struktur Organisasi	54
4.2.5 Sumber Daya Manusia	56

BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Karakteristik Informan	59
5.1.1 Jenis Kelamin	59
5.1.2 Tingkat Pendidikan.....	60
5.2 Evaluasi Penilaian Barang Milik Daerah Provinsi Riau Oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	61
5.2.1 Indikator Penilaian Atas Perencanaan	65
5.2.2 Indikator Penilaian Atas Pelaksanaan	77
5.2.3 Indikator Penilaian Atas Aktivitas Yang Telah Selesai Dilaksanakan	90
5.3 Faktor Kendala Yang Dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Evaluasi Penilaian Barang Milik Daerah Provinsi Riau.....	101

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	105
6.2 Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1.	Daftar Inventaris Aset Daerah Provinsi Riau	4
1.2.	Nilai Sewa Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022	5
2.1	Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	27
3.1	Informan Penelitian	34
4.1.	Jumlah PNS Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Tahun 2023	46
4.2.	Data ASN BPKAD Provinsi Riau Berdasarkan Golongan dan Pangkat Tahun 2024	56
4.3	Data ASN BPKAD Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024 ...	57
5.1	Identifikasi Informan Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin	58
5.2	Identifikasi Informan Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	59
5.3	Sumber Daya Manusia di Bidang Pengelolaan BMD	79
5.4	Target Sertifikasi Tanah Pemerintah Provinsi Riau	94

DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Pemikiran Tata Kelola Penilaian Barang Milik Daerah Provinsi Riau oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	30
4.1	Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam menerapkan pemerintahan, Peralatan Sipil Negara (ASN) memainkan peran penting sebagai salah satu faktor yang mengendalikan proses proses pemerintah. Keberhasilan ASN dalam mendukung administrasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang prinsip -prinsip pemerintahan yang baik dan penerapannya. Hukum 2014 No. 23, dalam Pasal 155 (3) Pasal 155 (3) Hukum No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

“Manajemen pembiayaan untuk implementasi masalah nasional harus dipisahkan dari pengelolaan masalah lain. Sebagai manajer masalah anggaran lokal, pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas penggunaan otoritas dalam menerapkan masalah ini, yang membutuhkan profesionalisme peralatan publik dalam pengelolaan sumber daya lokal.”.

Otonomi lokal adalah wewenang dan kewajiban wilayah otonom untuk mengatur dan mengelola masalah pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat menerapkan otonomi lokal, dibutuhkan peralatan untuk manajemen dan regulasi lokal sehingga dilakukan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, peran pejabat pemerintah sebagai pelayan Masyarakat dan nasional sangat penting untuk implementasi pedoman yang dirumuskan dan ditangani oleh partai politik berdasarkan kebutuhan lokal. Sebagai bagian dari implementasi

otonomi regional, pemerintah daerah saat ini didasarkan pada peraturan yang berlaku untuk menyediakan pihak -pihak yang relevan (pemangku

kepentingan internal dan eksternal) dengan informasi mengenai pengelolaan properti lokal (BMD). Sehubungan dengan manajemen properti negara bagian/regional, berdasarkan Pasal 1 (2) Peraturan Negara No. 27 tahun 2014, properti lokal diperoleh atau diperoleh dari beban pendapatan lokal dan anggaran pengeluaran. Atau dari akuisisi lain yang berlaku. Mengelola properti di wilayah yang semakin kompleksitas dan berkembang saat ini diperlukan dengan manajemen optimal dari semua manajer properti lokal. Petugas termasuk pemegang otoritas tertinggi dari properti lokal, sekretaris regional sebagai manajer produk, direktur keuangan regional, gubernur sebagai manajemen aset daerah Riau, pegawai negeri sipil dalam pengelolaan properti lokal; dan manajemen.

Properti lokal umumnya termasuk dalam laporan keuangan tahunan, terutama neraca pemerintah daerah. Neraca pemerintah daerah tidak diterapkan kecuali dikelola secara efektif dan efisien. Untuk mendukung pemerintahan yang baik, manajemen properti lokal harus diterapkan dengan baik pada saat rencana dan anggaran manajemen properti lokal.

Manajemen Aset Regional adalah penentu kinerja yang bersih. Oleh karena itu, ada analisis optimasi ketika mengevaluasi aset aset lokal yang ada:

Identifikasi, inventaris, tinjauan hukum, evaluasi harus dilakukan dengan tepat dan akurat. Pada titik ini, sistem informasi manajemen aset adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja tanpa perhatian untuk pemantauan dan kontrol yang lemah, menjadikan transparansi manajemen aset transparansi kerja.

Masalah utama yang muncul adalah perbedaan antara mewujudkan aset yang dicatat oleh agen manajemen dan SKPD sebagai pengguna produk. Ini karena

SKPD tidak dapat memberikan data yang akurat terkait dengan produk atau properti yang digunakan, dan oleh karena itu, terutama untuk jumlah biaya yang digunakan untuk pemeliharaan operasional yang harus usang, terutama untuk aset yang rusak dan tidak digunakan. untuk memberikan data yang akurat.

Katalog Masalah Tambahan Aset terkait dengan hambatan manajemen dalam pengelolaan aset. Penyakit itu menyebabkan pemerintah daerah Riau berjuang untuk menentukan aset yang terkendali. Untuk informasi lebih lanjut tentang keberadaan aset seluler dan real estat, Anda dapat menemukan semua organisasi peralatan lokal di lingkungan daerah Riau dari tabel berikut:

Tabel 1.1. Daftar Inventarisasi Aset Daerah Provinsi Riau

NO	URAIAN BARANG	SATUAN	JUMLAH ASET
1	Tanah	Persil	1086
2	Peralatan dan Mesin	Unit	826.754
3	Gedung dan Bangunan	Unit	8693
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Unit	4.65
5	Aset Tetap Lainnya	Unit	4.787.555
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Unit	3247

Sumber: Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Riau Tahun 2022.

Mengetahui jumlah aset pemerintah Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1, memungkinkan peneliti untuk memperkirakan jumlah aset yang dihitung dan berbagai masalah terkait. Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Riau tidak memiliki data yang akurat tentang aset tanah dan konstruksi karena kontrol manajemen antara pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat. Ini tentu membutuhkan waktu yang lama untuk mengelola dan menyelesaikan masalah terkait aset.

Fenomena yang terkait dengan tata kelola properti di wilayah tersebut, jenis properti di pemerintah Provinsi Riau adalah penunjukan dan fakta bahwa banyak lahan kosong yang tidak memilikinya disusui, dan ada baris dalam proses menilai properti di bidang pengawasan.

Kendala Penggunaan terjadi dalam pengelolaan aset atau properti regional di Kementerian Keuangan Indonesia, jenderal aset Provinsi Sumatra Barat dan Kepulauan Riau, khususnya di Provinsi Riau, sehingga penulis telah menemukan masalah sebagai berikut:

1. Tidak ada prosedur operasi standar untuk menilai karakteristik regional. Ini telah menghasilkan pengembalian aplikasi yang berlaku untuk Kantor Regional Aset Provinsi Riau, Sumatra Barat, dan Kantor Regional Aset Regional Kepulauan Riau, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia, atau dalam kasus ini, menurut wilayah. Badan Manajemen Keuangan dan Aset Provinsi Riau untuk menyelesaikan kekurangan dokumen yang diperlukan.
2. Secara khusus, komitmen pemerintah sebagai orang yang bertanggung jawab atas semua langkah dan pedoman mengenai pengelolaan aset lokal sehubungan dengan sewa tanah yang dicatat dalam kartu inventaris (KIB) A tidak diimplementasikan secara optimal. Ini disebabkan oleh kesulitan dalam menilai kerja sama dalam aset lokal, sebagaimana dicatat dalam data sewa pemerintah Provinsi Riau 2022. :

Tabel 1.2 Nilai Sewa Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022

No	Data Pemohon	Laporan Nilai	Besaran Sewa	Keterangan
1	Koperasi Riau Pangan Lestari	05 Mei 2022	-	Kekurangan :

				a. Kepastian Luasan; b. Jenis Nilai c. Foto; d. Lokasi Objek Penilaian
2	Komet Infra Nusantara	26 Juli 2022	Rp. 166.080.000	-
3	Goro Sae	14 Maret 2022	Rp. 128.086.819	Kekurangan : a. Kepastian Luasan; b. Jenis Nilai c. Foto; d. Lokasi Objek Penilaian
4	Jones	16 Februari 2022	-	Batal
5	BPR	28 Januari 2022	Rp. 374.006.000	Batal karena nilai terlalu lama
6	DLHK	25 November 2022	Rp. 89.095.000	-
7	Pasar Buah	19 Januari 2022	Rp. 1.633.865.000	-
8	Hotel Grand Zuri	16 November 2022	Rp. 563.440.000	-
9	Tower Bersama	22 Maret 2022	-	Batal
10	Prima Agri Nusa	30 Maret 2022	-	Sertifikat dan KIB tak jelas
11	Telkomsel	12 Desember 2022	Rp. 137.396.000	-
12	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama Eks Kanwil		Rp.1.526.200.000	Sertifikat tidak ditemukan
13	Tanah Bangunan Perumahan lain—lain Eks Kanwil Rumah Kediaman Sekda		Rp.3.102.000.000	Sertifikat tidak ditemukan

Sumber Data : Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, bahwa terlihat dari data pemohon ada 4 (empat) penilaian sewa tanah milik Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 yang dibatalkan dikarenakan kurangnya Kepastian Luasan, Jenis Nilai, Foto dan Lokasi Objek Penilaian yang masih belum jelas

1. Kurangnya minat ASN Pemerintah Provinsi Riau untuk menduduki jabatan fungsional penilai dikarenakan belum adanya informasi terkait jabatan fungsional penilai, sehingga kurangnya pengetahuan tentang pentingnya jabatan fungsional penilai pemerintah;
2. Tidak semua manajer properti lokal memahami dan memenuhi tugas dan fungsi secara optimal dalam mengelola properti lokal. Ini adalah hambatan bagi pemerintah daerah Riau dalam manajemen aritmatika yang tepat dan evaluasi aset. Fokus penelitian ini adalah pada penilaian properti lokal, terutama pada penilaian penggunaan aset tanah milik persewaan sewa pemerintah daerah bagian Riau. Evaluasi adalah proses memberikan nilai objek evaluasi dalam bentuk properti lokal pada waktu tertentu. Pergerakan properti regional, penghancuran dan penghapusan kapal selam, siklus basis harga satuan, proses evaluasi penggunaan BMD, transmisi BMD, implementasi saldo BMD dan eliminasi implementasi dan implementasi BMD.

Masalah utama pemerintah daerah bagian Riau dalam pengelolaan aset lokal pada saat ini adalah kebijaksanaan administratif dalam pengelolaan inventaris aset, seperti: Seperti status kontrol aset yang lemah. Faktanya, katalog aset adalah siklus manajemen yang sangat penting. Penyakit ini menyulitkan pemerintah daerah Riau untuk menentukan aset mana yang diperiksa. Ada beberapa alasan untuk fakta

bahwa kebijakan Provinsi Riau menilai penilaian, yaitu kurangnya pemerintahan penyebaran Riau dan kriteria kapasitas untuk menilai properti lokal sedang dinilai. Ini karena tidak ada sertifikasi atau hukum. Untuk alasan ini, pemerintah Provinsi Riau menggunakan para ahli Provinsi dan publik, partai-partai eksternal, untuk membantu dalam proses manajemen properti lokal, terutama selama tahap evaluasi Provinsi Riau.

Panduan yang dimaksudkan pemerintah adalah ASN dengan kompetensi ahli sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pekerjaan di Sumatra Barat, Riau, RIA, dan Kepulauan Riau. Ini adalah antrian dan waktu yang lama untuk menilai kebutuhan kepemilikan lokal

layanan penilaian untuk memenuhi berbagai persyaratan sehubungan dengan penggunaan properti lokal, transfer BMD dan peraturan lainnya. Pada saat ini, pemerintah Provinsi Riau sering menggunakan layanan penilaian independen (pribadi). Ini tidak mengimbangi kebutuhan anjing pria pemerintah daerah, sehingga kebutuhan pemerintah daerah juga diperlukan untuk semua pemerintah daerah. Kebutuhan ahli pemerintah daerah ini semakin diakui sebagai peringkat nilai diterapkan.

Evaluasi memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoprasikan tujuan dan target. Evaluasi juga akan memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan

publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu yang telah dicapai.

Evaluasi dalam manajemen aset Pemerintah Provinsi Riau, khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, sangat penting untuk menilai kondisi yang telah dijelaskan oleh peneliti, mengingat masih adanya kelemahan dalam koordinasi pengawasan dan pengendalian aset daerah antara BPKAD Provinsi Riau dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Evaluasi Pelaksanaan Tatakelola Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau pada Dinas BPKAD Riau"**.

1.2. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan tata kelola penilaian barang milik daerah Pemerintah Provinsi Riau Pada BPKAD Riau?
2. Kendala apa saja yang dihadapi BPKAD dalam evaluasi pelaksanaan tata kelola penilaian barang milik daerah Pemerintah Provinsi Riau Pada BPKAD Riau?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis evaluasi pelaksanaan tata kelola penilaian barang milik daerah Pemerintah Provinsi Riau Pada BPKAD Riau.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Badan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam tata kelola penilaian barang milik daerah Provinsi Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan didalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam perkembangan ilmu manajemen aset ataupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta dapat memperkaya khasanah terhadap jenis penelitian yang sama.
2. Manfaat Akademis, secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman tentang pengelolaan aset yang baik dan benar.

Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dapat ditarik berdasarkan hasil analisis studi penilaian tentang penilaian kepemilikan regional Riau oleh lembaga regional untuk manajemen keuangan dan aset daerah yaitu:

1. implementasi keseluruhan tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku sehubungan dengan inventaris, keamanan, pemeliharaan dan kepemilikan lahan. Aspek legalitas barang-barang lokal, seperti surat dari negara bagian dan pemilik bangunan, adalah banyak hal yang tidak terpenuhi, seperti sertifikat lahan, kontrak, dan protokol untuk menyerahkan barang. Berdasarkan teori evaluasi politik, evaluasi rencana tersebut dievaluasi dengan baik. Ini dapat dilihat dari anggaran untuk penilaian tahunan. Selain itu, informasi telah diteruskan tentang aset yang dijual oleh tim penilaian kewajiban pemerintah untuk menjelaskan rencana kerja. Penilaian implementasi kepemilikan regional dalam bentuk suatu negara membutuhkan kerja sama dengan OPD yang relevan, membuat penggunaan aset optimal dan pejabat pemerintah negara bagian RIAU menghindari penyalahgunaan wewenang oleh para ahli negara. Ahli. Namun, sejauh ini, tidak ada pemerintah RIAU dan dengan standar kapasitas untuk menilai properti lokal. Ini karena tidak ada payung hukum yang mengatur prosedur untuk mendapatkan sertifikasi evaluasi. Penilaian kegiatan yang diselesaikan

menunjukkan bahwa pendaftaran inventaris fisik, administratif, hukum dan manajemen properti lokal dilakukan dengan tepat. Namun, sejauh ini, peringkat SOP masih dalam proses manufaktur, yang mengarah ke antrian untuk menilai properti regional kantor regional Kantor Umum Aset Daerah Provinsi Riau.

2. Keterbatasan Lembaga Regional untuk Manajemen Keuangan dan Aset dalam Menilai Penilaian barang terhadap Properti Regional di Pemerintah Daerah dari Sumber Daya Manusia, yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia Khusus yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia khusus. Pemahaman karyawan yang terbatas, kompetensi profesional daripada ketersediaan karyawan. Data terbatas yang mendukung aset tetap saat mengisi format KIB dan KIR adalah karena sulit untuk menerima dokumentasi tentang aset lokal jangka panjang dengan status jangka panjang dan tidak jelas. Kapasitas keuangan regional adalah masalah kemampuan untuk mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan keamanan, dan sertifikasi lahan memiliki persyaratan anggaran yang signifikan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti berupaya memberikan beberapa kontribusi, seperti:

1. Pemerintah daerah Riau dan lembaga manajemen keuangan dan aset regional Riau diharuskan melakukan penilaian properti lokal. Secara khusus, pemerintah Riau dan aset penilaian SOP dengan cepat dibuat dan implementasinya dapat menghindari penggunaan dan penyalahgunaan otoritas yang optimal.
2. Saat ini, Badan Manajemen Keuangan dan Aset Riau memiliki penilaian kepemilikan regional oleh Biro Regional Aset Negara Biro Umum Kepulauan Riau, Sumatra Barat dan Kementerian Keuangan. tidak diketahui. Oleh karena itu, perlu untuk merekrut karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam aset lokal, terutama aset real estat.
3. Lembaga Regional untuk Manajemen Keuangan dan Aset di Riau harus meningkatkan anggaran untuk menerapkan penilaian aset, terutama untuk pemeliharaan, keamanan dan sertifikasi lahan, yang membutuhkan anggaran yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah M. Syukur, 2006, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi Kebijakan*, Jakarta. P4N.
- Agus, Puji dan Ryanto. 2012. *Manajemen Barang Milik Daerah*. Bandung: dbuku..
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cetakan Ketigabelas, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budi Winarno, 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses Dan Studi Kasus*, Buku Seru, Jakarta.
- Barnard, I, Chester. 2008. *Organisasi dan manajemen, Struktur, Perilaku dan proses*. Jakarta: Gramedia.
- Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Erizul Dan Febri Y. Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol.2 No.2.
- Hamim, Sufian dan Indra Mukhlis Adnan. 2012, *Administrasi, Organisasi dan Manajemen. Suatu Ilmu Teori, Konsep dan Aplikasi*. Multigrafindo, Pekanbaru.
- Hidayat Muchtar. 2011. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta: LaksBang.
- Ismail, 2013. *Buku Ajar Analisis Kebijakan Publik* (Surabaya : Universitas Hang Tuah).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. *PSAK 16 (Revisi 2011) : Aset Tetap*. Jakarta : IAI
- Keban, Yeremias, T, 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu (Edisi Ketiga)*, Gava Media, Yogyakarta.
- Legino, S. 2009. *Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi: Kepemimpinan Transformasional dan Organisasi Lateral*. Jakarta: Indonesia Press.
- Mahmudi, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta

- Maleong, Lexi J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Munaf Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Pertama, Pekanbaru, Marpoyan.
- Munawir, S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Liberty. Yogyakarta.
- Mustika, Rasydah. 2006. *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap*. Padang. Jurnal Produktivitas dan Manajemen Aset. No. 4.
- Nawawi, Hadari. 2013, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Jogjakarta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Riant Nugroho, 2012. *Public Policy*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Robbins, P. Stephen. 2003. *Perilaku Organisasi. Edisi Sembilan, Jilid 2. Edisi Bahasa Indonesia*. PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Samodra, Wibawa., Yuyun. P dan Agus P. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Doli. D. 2004. *Manajemen Aset*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sedarmayanti. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Sedarmayanti, 2014. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Simon, A. Herbert, 2004, *Administrative Behavior, Perilaku Administrasi : Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Alih Bahasa ST. Dianjung, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ketiga belas, Bumi Aksara, Jakarta.
- Subarsono, AG. 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan aplikasi*, Jakarta. Pustaka Pelajar.

- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Administratif*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sugiama, A Gima. 2014. *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*. Edisi Pertama, Bandung: Guardaya Intimarta
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media
- Thoha, Miftah. 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Usman, Husaini. Setiadi, Purnomo. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf, M. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.

B. JURNAL

- Agung Krisindarto. 2012. *Pengelolaan Aset Daerah tanah Milik pemerintah Kota Semarang*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. 8(4). 400-411.
- Fasiha. 2013. *Analisa pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Hasani, Joozi. 2002. *Evaluasi Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah pada Bahian Aset*. Lombok Tengah. Jurnal Manajemen Volume 2 Nomor 2.
- Oci Dian wahyuni. (2014). *Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Pekanbaru di Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi tahun 2012*. Skripsi. Universitas Riau.
- Sholeh, Rochmansjah. 2010. *Pengaruh Faktor-faktor Pengamanan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 tetang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau.